

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA MALITU KECAMATAN POSO PESISIR
SELATAN KABUPATEN POSO**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat ujian untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sintuwu Maroso**

Oleh

DIMAS HENDRA BUDIMAN
NPM : 91911405171068

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

ABSTRAK

DIMAS HENDRA BUDIMAN. 2023. “*Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso*”. Dibimbing oleh Suwardhi Pantih dan Margaretha Badu.

Kata Kunci: *Peran Kepala Desa*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat walaupun secara umum sudah baik namun belum maksimal. Diperlukan hubungan sirah-tuhrahmi yang saling timbal balik yang saling mengisi dalam untuk program Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Peran kepala desa dalam memberikan pembinaan terhadap aparaturnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sudah baik dengan memberikan arahan dan dorongan motivasi untuk selalu semangat dalam menjalankan tugas. Peran kepala desa dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sudah baik tetapi perlu upaya yang konsisten dan menyeluruh yang melibatkan masyarakat desa di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diantaranya terbatasnya akses jaringan internet serta keterbatasan kemampuan dan keterampilan aparatur desa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR	
A. Kajian Pustaka.....	6
1. Peran Kepemimpinan Kepala Desa.....	6
2. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.....	10
3. Konsep Pemberdayaan.....	13
B. Landasan Teoritis dan Kepustakaan yang Relevan.....	23
C. Alur Pikir.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian	25
1. Tipe Penelitian.....	25
2. Dasar Penelitian.....	25
B. Definisi Konsep	26
C. Jenis Data.....	26
D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	27
E. Instrumen Penelitian	28
F. Analisis Data	28
G. Lokasi Penelitian	29
H. Waktu dan Jadwal Penelitian	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Pedoman Wawancara
- Dokumentasi
- Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
- Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pembangunan Nasional, pemerintah mempunyai posisi sentral paling depan sebagai motivator, pemerintah juga mempunyai efektivitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan Negara dan tujuan nasional. Sebagai mana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alenia keempat sebagai mana cita-cita Negara Republik Indonesia berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan penataan pemerintah baik secara horizontal maupun vertikal. Seorang pemimpin tentunya akan menghadapi bawahannya dengan berbagai sikap, karakter dan tingkah laku yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan sifat individu manusia memiliki sifat, sikap dan cara pikir yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kemampuan dan kesanggupan untuk mempengaruhi opini, sikap dan tingkah laku orang lain agar melakukan pekerjaan dengan profesional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 26 kewajiban kepala desa salah satunya adalah memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. Pemerintah desa merupakan pemerintah terendah sebagai penghubung pemerintah Indonesia dengan masyarakat, maka kedudukan desa dalam proses pembangunan sangatlah penting. Karena desa merupakan daerah yang harus dimaksimalkan, pemerintah memberikan program-program pembangunan, pelatihan, dan pemberian sarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan desa. Guna memenuhi unsur pemerataan pembangunan langkah seperti program-program pemerintah, pemberian pelatihan kepada masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang hasil-hasilnya berujung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab secara langsung serta memelihara masyarakatnya untuk mempertahankan standar hidup yang layak maka pemerintah desa berhak mengelola sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Usaha pendorong dan memberikan dukungan kepada program kesejahteraan masyarakat harus dilakukan oleh pimpinan dengan cara memilih dan memilih apa saja motivasi dan dukungan yang perlu dilakukan. Untuk mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia adalah melalui program pemberdayaan masyarakat.

Dari berbagai program pemberdayaan tersebut sangat dibutuhkan kesanggupan dan keseriusan pemerintah setempat dalam hal ini adalah pemerintah Desa. Dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada dapat diarahkan kepada

pembangunan Desa untuk dapat diimplementasikan disetiap kebijakan sehingga tidak dapat menimbulkan masalah didalam proses pembangunan tersebut.

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan bahwa Kepala Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan belum maksimal fungsinya khususnya dalam upaya memberdayakan masyarakat desa Hal ini terlihat dari semakin hari jumlah masyarakat yang masih memilih sebagai petani semakin kecil. Masyarakat lebih tertarik untuk bekerja sebagai karyawan disebuah perusahaan dan di instansi-instansi pemerintah serta swasta lainnya sehingga sektor pertanian dan perkebunan dianggap tidak menjanjikan lagi. Pergeseran paradigma dimasyarakat desa yang beranggapan bahwa usaha pertanian atau perkebunan sudah tidak menjanjikan lagi, yang justru membuat sektor tersebut menjadi tidak berkembang menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Dengan demikian, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa seharusnya dapat mengantisipasi dan memberikan penyuluhan dan pelatihan serta memotivasi masyarakat agar mendapat dorongan dan menyadari bahwa sektor pertanian dan perkebunan adalah sektor kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat. Beberapa program pemberdayaan seperti pemberdayaan petani dan program pemuda desa, namun dari beberapa program tersebut ada yang berjalan dengan baik dan ada juga program yang belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pemberdayaan untuk masyarakat desa.

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat judul: “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat peran kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat peran kepala desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

2. Manfaat Penelitian

Dari pelaksanaan penelitian ini memberikan manfaat yaitu:

a. Aspek Akademik

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi referensi ilmiah dalam khazanah ilmu pemerintahan, terutama mengenai peran kepala desa dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

b. Aspek Praktis

Dapat menjadi masukan bagi kalangan pemerintah daerah Kecamatan Poso Pesisir Selatan agar dapat mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi, Jakarta; Rineke Cipta.

Sukandarummidi. 2002. *Metode Penelitian; Petunjuk Dalam Penulisan Atau Menentukan Judul*, Jakarta; Bumi Aksara.

Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.

Siagian Sondang. P. 1988, *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Haji Agung.

.....2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

..... 2009. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.

Soejono, Soekanto. 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru: Rajawali Pers. Jakarta.

Siagian, Sondang. P, 1989, *Filsafat Administrasi*, CV. Haji Mas Agung.

Hadari, Nawawi dan Martin Hadari. 1993. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rivai, Veithzal. 2008. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Dokumen-dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.